

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara menghadapi serangkaian dilema kebijakan energi yang belum saling berhubungan. Pada Juni 1992, *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) dengan konsorsium enam anggota yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghadapi pilihan antara melindungi kelestarian lingkungan dan memperkuat perdagangan.¹ Secara umum negara-negara ASEAN secara keseluruhan, mengalami deforestasi lima kali lebih besar dari rata-rata global dan sepuluh kali lebih besar dari pada rata-rata negara Asia.² Penebangan yang tidak terkendali di seluruh Asia Tenggara telah memberikan kontribusi untuk erosi tanah, jatuhnya produktivitas pertanian, munculnya penyakit tropis baru, kenaikan harga pangan, tingkat kemiskinan pedesaan yang lebih tinggi, dan kepunahan spesies besar.³ Dalam tujuan untuk mengawasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) antara industri dan lingkungan, Asia Tenggara tampaknya menerapkan kebijakan yang lebih baik yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di atas pelestarian lingkungan alam untuk masing-masing negara anggota.

¹ Benjamin K. Sovacool, "Reassessing Energy Security and the Trans-ASEAN Natural Gas Pipeline Network in Southeast Asia". (Pacific Affairs, 2009) Vol 82: No. 3 – Fall. Hlm 1.

² ASEAN Secretariat, "Second ASEAN State of Environment Report". (Jakarta: ASEAN, 2000)

³ Benjamin K. Sovacool, *Reassessing Energy Security*, hlm. 2.

Selanjutnya ASEAN tampaknya telah mencapai persimpangan pilihan yang sama dalam hal keamanan energi. Dalam menghadapi kondisi dimana harga minyak dunia yang semakin mahal dan penambangan batu bara liar yang semakin berlebihan, negara-negara anggota ASEAN kemudian melakukan transisi penggunaan energi dari yang pada awalnya menggunakan bahan bakar fosil dan merangkul energi terbarukan dengan mengoptimalkan efisiensi energi.⁴

Energi menentukan kualitas kehidupan sehari-hari manusia dan mendorong pembangunan ekonomi. Konsumsi energi meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. ASEAN telah memiliki lebih dari 520 juta penduduk dan angka ini terus meningkat beberapa persen per tahun.⁵

Meningkatnya permintaan energi mengakibatkan munculnya investasi baru pada bidang produksi energi dan pembangunan infrastruktur guna mengamankan persediaan energi yang memadai dan stabil. Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E Ong Keng Yong menjelaskan bahwa dengan akses yang memadai, energi yang terjangkau telah menjadi elemen penting untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan manusia dan meningkatkan standar hidup.⁶ Namun kurangnya akses pada energi yang berkelanjutan dan modern merupakan penyebab

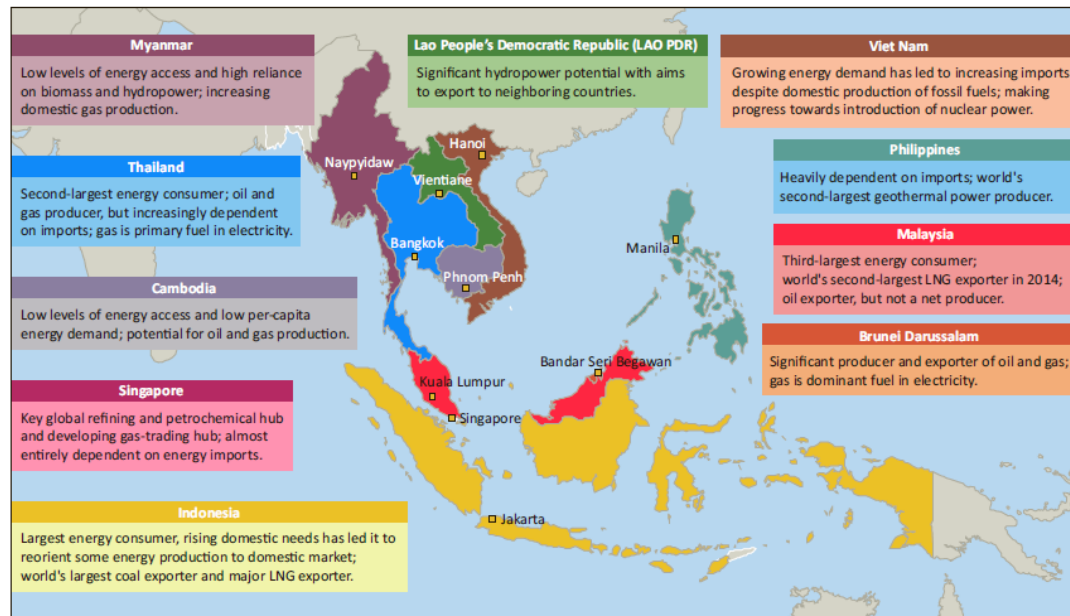
⁴ *Ibid*

⁵ "Building the Trans – Asean Gas Pipeline". (Asia Pasific Review, 2003), http://www.drpaul.de/files/Publication/da9cade4-cb11-4e90-a4da-6378b383d52c/Presentation/PublicationAttachment/0f8025a1-9c8c-4f38-a545-421996d5148d/TransAsianPipeline_AP03.pdf

⁶ H.E Ong Keng Yong, "Integration and Energy Cooperation in ASEAN". (Keynote Speech at the Eighth Gas Information Exchange (GASEX 2004) ECONOMIC). (Singapore, 2004) <http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-56/speeches-statements-of-the-former-secretaries-general-of-asean/item/economic-integration-and-energy-cooperation-in-asean>

utama dari kerusakan lingkungan disebagian besar kawasan dunia berkembang, dan menjadi hambatan utama dari pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.1. Peta Energi Kawasan ASEAN



Sumber: International Energy Agency⁷

Oleh karenanya ASEAN harus mengurangi tingginya konsumsi energi impor, khususnya minyak. Salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi ialah harga minyak yang tinggi dan dapat merusak ekonomi ekspor. Hal ini akan langsung berdampak pada meningkatnya inflasi dan biaya produksi, selain menyebabkan ketidakstabilan pasar finansial dan memperburuk perlambatan ekonomi di negara ekonomi utama.

⁷ “Southeast Asia Energy Report: World Energy Outlook”. (International Energy Agency, 2015), hlm. 29, https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015_SouthEastAsia.pdf

Sebagai pengganti bahan bakar minyak, gas alam digunakan sebagai energi alternatif terutama dalam mematuhi kebijakan nasional dan global yang lebih ketat terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan. Asia Tenggara mengandung kekayaan gas alam yang lebih besar daripada minyak. Gas alam memiliki peranan penting pada energi dalam negeri beberapa negara dalam kawasan dan telah menjadi komoditi ekspor utama dari Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darusalam. Beberapa negara tersebut telah membuat upaya besar untuk mengembangkan industri gas alam.⁸ Penggunaan gas alam telah menjadi komponen utama dalam strategi swasembada energi dan diversifikasi bahan bakar.

Potensi ini dimanfaatkan ASEAN dengan melakukan perdagangan lintas batas di bidang energi. Perdagangan lintas batas di bidang energi, khususnya gas dan listrik, memiliki jaringan yang lebih interkoneksi dengan menawarkan manfaat yang signifikan baik dari segi keamanan, fleksibilitas dan kualitas pasokan energi dan kompetisi yang lebih besar. Sehingga pada tahun 2002 ASEAN telah mengumumkan rencana untuk membangun jaringan pipa gas alam yang terintegrasi melalui Proyek Infrastruktur *Trans-ASEAN Gas Pipeline*, atau TAGP untuk menghubungkan cadangan gas di Teluk Thailand, Myanmar dan Indonesia ke seluruh kawasan.⁹

⁸ Benjamin K. Sovacool, *Reassessing Energy Security*, hlm. 3-4.

⁹ “The Trans-ASEAN Gas Pipeline – Accelerating Gas Market Integration Within The ASEAN Region: Impact of the TAGP on gas market integration in ASEAN”, hlm. 4, <http://www.iapg.org.ar/WGC09/admin/archivosNew/Special%20Projects/3.%20IGU%20GMI%20Guidelines/3.%20IGU%20GMI%20Guidelines%20FINAL%20-%20CD%20contents/Transasean.pdf>

Interkoneksi jaringan pipa gas intra-regional, yang dibangun melalui proyek TAGP akan meningkatkan dan menjamin aksesibilitas dan ketersediaan energi di kawasan tersebut. Interkoneksi gas akan menyebabkan harga gas yang terjangkau dan dapat diakses oleh industri, bisnis dan penggunaan rumah tangga di seluruh ASEAN. Proyek *Trans-ASEAN Gas Pipeline* (TAGP) bertujuan untuk membangun interkoneksi gas yang lebih luas di seluruh kawasan, meskipun kemajuan telah diperlambat oleh kurangnya sumber gas alam dan persyaratan investasi yang besar.¹⁰ Ketersediaan dan akses ke gas alam pasti akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produktivitas, dan menyebabkan perubahan dalam kualitas hidup, perilaku sosial dan gaya hidup. Advokat dari TAGP berharap untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, memperoleh devisa, mengurangi risiko perubahan iklim, dan meningkatkan keamanan energi regional.¹¹

Tabel 1.1. Produksi Gas Alam Negara Anggota ASEAN (bcm)

	1990	2011	2020	2025	2030	2035	2011-2035*
Brunei Darussalam	9	13	16	15	15	14	0.5%
Indonesia	48	81	108	118	129	139	2.3%
Malaysia	17	56	71	68	67	65	0.6%
Philippines	0	4	5	5	4	4	0.2%
Thailand	6	28	19	15	11	7	-5.5%
Vietnam	0	9	13	12	12	12	1.3%
Rest of ASEAN	1	12	18	19	21	22	2.6%
Total ASEAN	82	203	249	252	258	264	1.1%
<i>Share of world</i>	<i>4.0%</i>	<i>6.0%</i>	<i>6.3%</i>	<i>5.8%</i>	<i>5.6%</i>	<i>5.3%</i>	<i>n.a.</i>

* Compound average annual growth rate.

Sumber: International Energy Agency, World Energy Outlook ¹²

¹⁰ "Southeast Asia Energy Outlook Chapter 3: Fossil, Fuel, and Supply Potential", (International Energy Agency, 2013), hlm. 82,

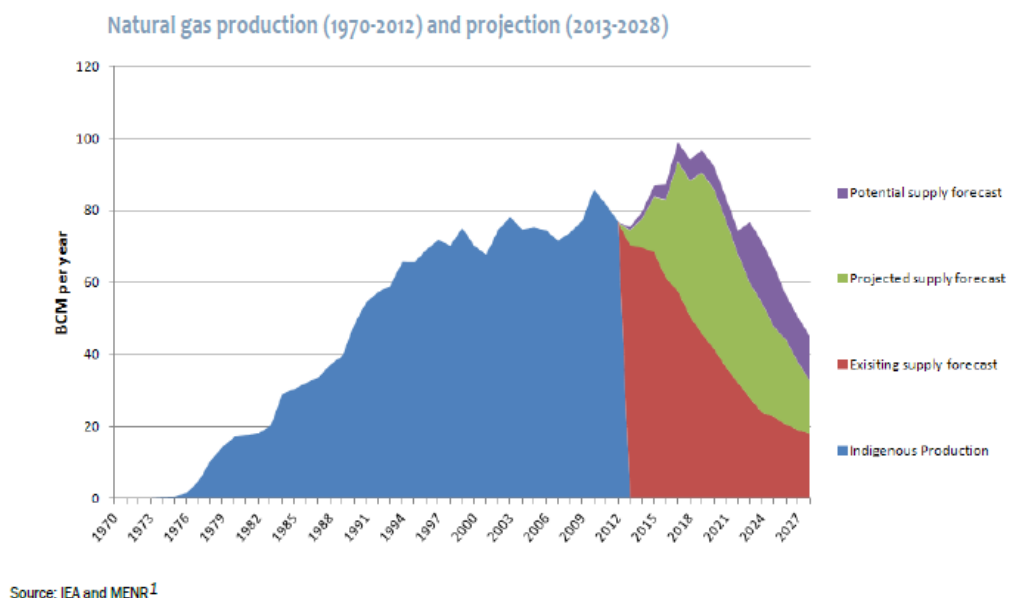
<https://www.iea.org/media/protected/seq/ESSofIndonesia2014final.pdf>

¹¹ Benjamin K. Sovacool, "Energy Policy and Cooperation in Southeast Asia: The History, Challenges, and Implications of the Trans-ASEAN Gas Pipeline Network (TAGP)", (Energy Policy, 2015) Vol. 37: No. 6, hlm. 2356-67.

¹² IEA, *World Energy Outlook*, hlm. 38.

Indonesia menjadi salah satu produsen gas alam yang penting di kawasan. Pada tahun 2012 Indonesia menghasilkan 76700000000 meter kubik (bcm) (atau 2,7 triliun kaki kubik standar -tscf) sebesar 38% dari keseluruhan wilayah menurut data statistik IEA. Produksi gas alam dalam negeri telah meningkat dari 67,6 bcm (2,4 TSCF) pada tahun 2001. Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa itu akan meningkat menjadi 98,8 bcm (3,5 TSCF) pada tahun 2017, dan kemudian akan menurun menjadi kurang dari setengah dari puncak produksi tahunan setara dengan 45 bcm (1,6 TSCF) di tahun 2028.¹³

Tabel 1.2. Produksi (1970-2012) dan Proyeksi (2013-2028) Gas Alam



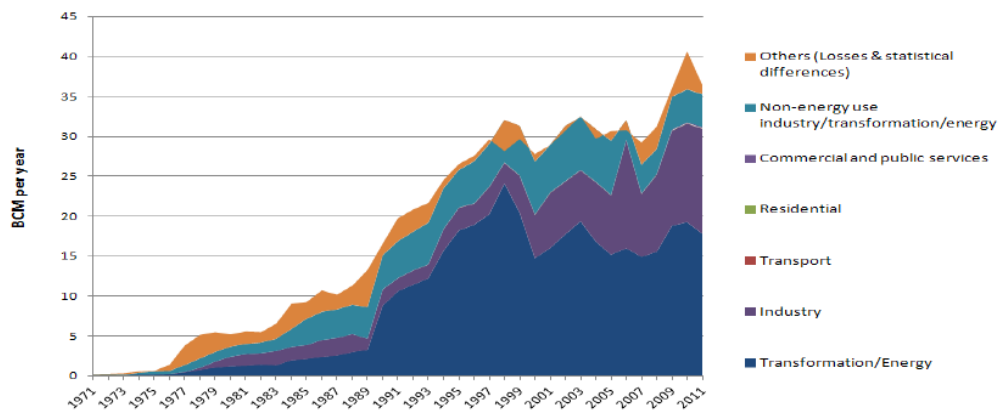
Sumber: International Energy Agency, World Energy Outlook¹⁴

¹³ Bcm (*billion cubic meter*) dan tscf (*trillion standard cubic feet*), keduanya merupakan satuan hitung untuk mengukur satuan produksi gas alam. “Energy Supply Security: Emergency Response of Partner Countries 2014, Indonesia”, (Internasional Energy Agency, 2014), hlm. 19 <https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf>

¹⁴ IEA, *World Energy Outlook*, hlm. 45.

Total konsumsi gas alam dalam negeri Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 35 bcm (1,2 TSCF) di tahun 2002 menjadi 39,3 bcm (1,4 TSCF) pada tahun 2012. Peningkatan konsumsi gas alam ini dialokasikan pada beberapa sektor pengolahan energi alternatif sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut.¹⁵

Tabel 1.3. Konsumsi Gas Alam Pada Beberapa Sektor



Sumber: IEA, Natural Gas Information¹⁶

Semakin berkembangnya total produksi dan konsumsi gas alam di kawasan ASEAN melalui proyek TAGP membutuhkan pengamanan khusus agar keamanan jaringan saluran energi dapat tetap terjaga. Dalam rancangan proyek TAGP pengertian sederhana dalam menjelaskan keamanan energi adalah untuk membuat akses yang aman pada bahan bakar. Pengertian keamanan energi dijelaskan lebih rinci dalam beberapa dimensi tambahan penting terkait ketersediaan (*availability*),

¹⁵ IEA, *Energy Supply Security*, hlm. 20-21.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 20.

keterjangkauan (*affordability*), efisiensi dan lingkungan (*efficiency and environmental*) dan kepengurusan sosial (*social stewardship*).¹⁷

Keamanan energi (termasuk di dalamnya *availability, affordability, efficiency and environmental, social stewardship*) kemudian menjadi perhatian khusus dalam level regional ASEAN. Dengan keamanan energi dapat memastikan pengaturan yang lebih baik dalam hal kontrol permintaan energi, pengamanan jalur transportasi energi, diversifikasi sumber persediaan energi dan perubahan campuran energi.¹⁸ Dalam hal ini kemudian dibutuhkan kerjasama yang lebih dalam mengenai isu keamanan energi di kawasan.

Menurut Nicolas Francais sumber daya energi terdistribusikan secara kurang merata dalam lintas negara, hal ini karena terbentuk klasifikasi negara berdasarkan *energy-rich* dan *energi-poor*, dengan negara satu dan yang lain diberkahi oleh jenis sumber daya energi yang berbeda. Distribusi yang kurang merata ini kemudian memberikan kesempatan yang besar untuk dibentuknya kerjasama kawasan dan untuk meningkatkan perdagangan energi intra-regional. Dalam perspektif jangka panjang, alasan untuk kerjasama regional diharapkan dapat mengalihkan eksploitasi sumber daya energi fosil secara bertahap dan pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan perhatian bersama perihal isu keamanan energi dalam kawasan.¹⁹

¹⁷ Benjamin K. Sovacool, "Reassessing Energy Security and the Trans-ASEAN Natural Gas Pipeline Network in Southeast Asia", (Energy Policy, 2015), hlm. 4, <http://www.researchgate.net/publication/233593524>

¹⁸ Françoise Nicolas, "Energy Security a Shared Concern and a Strong Rationale For Energy Cooperation" dalam *ASEAN Energy Cooperation: An Increasingly Daunting Challenge*. (Paris: Institut Français des Relations Internationales (IFRI), 2009), hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 17-19.

Daniel Yergin menyimpulkan bahwa keamanan energi merupakan suatu sistem yang dibentuk berdasarkan otoritas kebijakan nasional dan institusi internasional dengan mendukung peningkatan investasi, pembangunan, dan inovasi sehingga mampu memajukan integrasi kawasan.²⁰ Berdasarkan sudut pandang ini, Indonesia sebagai salah satu negara utama ASEAN yang memiliki sumber daya energi gas alam yang jumlahnya relatif besar mempertimbangkan arah kebijakan luar negeri untuk melakukan kerjasama energi dalam suatu sistem global.

1.2 Rumusan Masalah

Telah dijabarkan di atas bahwa kerjasama energi ASEAN dalam proyek *Trans-ASEAN Gas Pipelines* (TAGP) dibentuk untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menjaga stabilitas keamanan energi. Adapun Indonesia sebagai salah satu negara dominan di ASEAN melihat potensi proyek TAGP untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan integrasi kawasan. Berdasarkan pemahaman yang dibangun di latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana pengaruh proyek *Trans-ASEAN Gas Pipelines* (TAGP) terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di bidang kerjasama energi pada tahun 2002-2015?

²⁰ Daniel Yergin, "The Quest: Energy Security, and The Making of a Modern World", (London: Penguin Books, 2012), hlm. 269.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mendapatkan gambaran pengaruh kerjasama energi ASEAN dalam proyek *Trans-ASEAN Gas Pipeline* (TAGP) terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2002-2015
2. Memberi pemahaman mengenai peran kebijakan luar negeri Indonesia terkait *Cooperative Energy Governance* guna memajukan pertumbuhan ekonomi dan integrasi kawasan ASEAN.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari seluruh rangkaian penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi para peneliti Hubungan Internasional terkait hubungan *sustainable development* dan *energy security* dalam kerjasama energi regional terhadap pengaruh kebijakan luar negeri suatu negara.
2. Memberikan pemahaman tentang pengaruh kerjasama energi ASEAN dalam proyek *Trans-ASEAN Gas Pipeline* (TAGP) terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2002-2015

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Level Analisis Kebijakan Luar Negeri

Georg Sorensen dan Jackson Robert menyatakan bahwa analisis kebijakan luar negeri adalah studi manajemen hubungan eksternal dan aktivitas-aktivitas negara-bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijakan dalam negerinya. Kebijakan luar negeri merupakan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan interaksi hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non-pemerintah dengan tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan dengan negara-negara asing.²¹

Pada analisis kebijakan luar negeri terdapat klasifikasi pengambil kebijakan internasional yang terbagi dalam tiga level analisis, yaitu:

1.5.1.1 Level Sistemik

Teori level sistemik menjelaskan kebijakan luar negeri dengan menunjuk pada kondisi dalam sistem internasional yang memaksa atau menekankan negara untuk bertindak dengan cara tertentu, yaitu untuk mengikuti kebijakan luar negeri tertentu (misalnya, distribusi kekuasaan di antara negara-negara; saling ketergantungan ekonomi dan politiknya).

²¹ George Sorensen & Robert Jackson, "Konsep Kebijakan Luar Negeri" dalam *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 439.

1.5.1.2 Level Negara-Bangsa

Pendekatan ini menekankan kemampuan pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya kekuatan negara yang bersifat *state-centred* (misalnya, tipe pemerintah, demokratis atau otoriter; hubungan di antara alat negara dan kelompok dalam masyarakat; birokrasi yang menyusun alat negara).

Pada pendekatan kebijakan luar negeri level negara-bangsa, dijelaskan dengan memeriksa hubungan antara alat-alat negara dan masyarakat domestik. Hubungan yang terjalin antar keduanya dirasa sangat penting karena menilai kemampuan pemerintah untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya kekuatan negara.²²

*Kebijakan luar negeri tidak dibuat oleh negara secara keseluruhan tetapi oleh pemerintahnya. Akibatnya, hal yang penting adalah kekuatan negara, dengan pemerintah yang dapat mengekstrak demi tujuannya dan mencerminkan kemudahan pembuat keputusan sentral yang dapat mencapai tujuannya.*²³

Dalam analisis level negara-bangsa dikatakan bahwa tidak cukup untuk menguji distribusi kekuatan secara keseluruhan atau distribusi kekuatan secara sistemik, melainkan perlu juga untuk menguji hubungan antara pemerintah negara dan masyarakatnya agar dapat menilai dengan tepat kemampuan pemerintah untuk memobilisasi dan mengekstraksi sumber daya masyarakat untuk tujuan kebijakan luar negeri (misalnya sumber daya energi alam, jalur akses energi, dan lain

²² George Sorensen & Robert Jackson, "Level Negara-Bangsa", dalam *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 452.

²³ *Ibid*

sebagainya). Bahwa analisis kebijakan luar negeri terutama dan paling utama harus fokus pada pemerintahan negara.²⁴

1.5.1.3 Level Pembuat Keputusan Individual

Pada analisis level individu, manusia dirasa mempunyai keputusan yang rasional dan objektif (misalnya, cara berpikirnya, keyakinan dasar, dan prioritas pribadi).²⁵ Selanjutnya Jerel Rosati menunjukkan beberapa cara dimana kesadaran manusia (yaitu proses memperoleh pengetahuan dengan menggunakan alasan, intuisi, atau persepsi) dan pembuat kebijakan menjadi berarti.

Berdasarkan peringkat analisis yang dikemukakan oleh Jackson, Sorensen, Bjola, dan Kornprobst penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara-bangsa. Pada analisis lebih lanjut penulis menguji hubungan pemerintah negara dan masyarakatnya agar dapat menilai dengan tepat kemampuan pemerintah untuk memobilisasi dan mengekstraksi sumber daya masyarakat untuk tujuan kebijakan luar negeri.

1.5.2 Sustainable Development

Susan Baker menjelaskan bahwa *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan *environmentalist* baru. Pendekatan ini berusaha untuk merekonsiliasikan dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi pembangunan dengan mengadopsi perspektif global dalam menanggapi

²⁴Corneliu Bjola dan Markus Kornprobst, "Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics", (USA: Routledge, 2013).

²⁵ George Sorensen & Robert Jackson, "Konsep Kebijakan Luar Negeri", dalam *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 460.

suatu fenomena.²⁶ Pada model ini ditekankan bahwa pembangunan kesejahteraan manusia tidak harus tergantung pada kerusakan alam yang ditimbulkan.

Bob Giddings, Bill Hopwood, dan Geoff O'Brian memaparkan bahwa *sustainable development* merupakan suatu konsep yang dibentuk berdasarkan teori-teori yang dibangun oleh masyarakat dan organisasi mengenai pandangan dunia yang berbeda, umumnya menjelaskan interaksi antara lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.²⁷

Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari upaya untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial ke dalam paradigma pembangunan baru. Roseland dalam Baker menambahkan bahwa paradigma ini mempromosikan bentuk perubahan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materiil dan non-materiil manusia, memajukan keadilan sosial, memperluas efektivitas organisasional, dan membangun manusia dan kapasitas teknik terhadap keberkelanjutan.²⁸ Adapun tujuan dari keberlanjutan ini memerlukan perlindungan dari basis sumber daya alam karena pembangunan di masa depan akan sangat tergantung pada hal tersebut.

Ekins dalam Baker menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi atau pilar dari pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, dimensi sosial terkait dengan adat istiadat manusia dan nilai-nilai, hubungan yang terjalin dan lembaga. *Kedua*, dimensi

²⁶ Susan Baker. "Part 1 – Theoretical and conceptual exploration of sustainable development, 2 – The concept of sustainable development", dalam *Sustainable Development*. (New York: Routledge, 2006) hlm. 17-18.

²⁷ Bob Giddings, Bill Hopwood, and Geoff O'Brian. "Environment, Economy, and Society: Fitting Them Together Into Sustainable Development" (UK: Wiley InterScience Publisher, 2002), https://www.researchgate.net/profile/Bill_Hopwood/publication/227650507_Environment_economy_and_society_fitting_them_together_into_sustainable_development/links/53e3d6dc0cf21cc29fc6163a.pdf

²⁸ Susan Baker, *Sustainable Development*, hlm. 24.

ekonomi menjelaskan mengenai alokasi dan distribusi sumber daya yang langka. *Ketiga*, dimensi ekologi menjelaskan kontribusi baik dari ekonomi dan sosial, dan efeknya pada lingkungan dan sumber daya. Adapun hubungan yang terjalin antar ketiganya dapat digambarkan melalui gambar 1.2. dibawah.

Gambar 1.2. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan: ekonomi, ekologi, dan masyarakat

Mempromosikan pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang terus berjalan (dinamis), yang karakteristiknya dapat berubah dari waktu ke waktu, melintasi ruang dan lokasi dalam konteks sosial, politik, budaya, dan sejarah yang

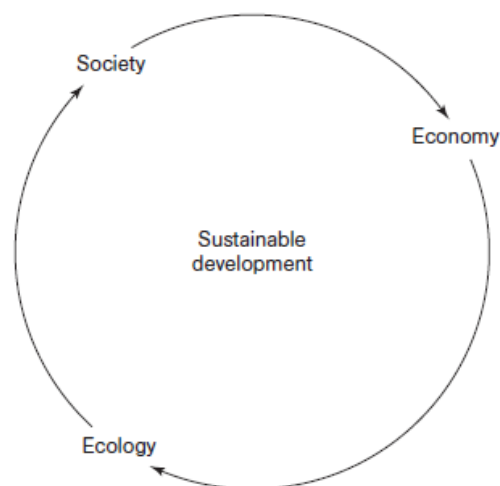


Figure 1.1 *Sustainable development: linking economy, ecology and society*

berbeda. Adapun peran pemerintah dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan di semua tingkat organisasi sosial, dari tingkat internasional, nasional, sub-nasional, hingga pada tingkat sosial individu.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 27-28.

1.5.3 *Energy Security*

Intervensi otoritas negara dalam pengelolaan dan distribusi energi dibenarkan dalam hal 'keamanan energi', yakni dengan memastikan bahwa insentif yang tepat dan instrumen kebijakan digunakan untuk mendorong perusahaan swasta untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memproduksi dan menyalurkan pasokan energi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bangsa. Deutch dan Schlesinger dalam Michael T. Klare menjelaskan bahwa 'keamanan energi' harus dapat memastikan pengolahan berkelanjutan pasokan energi secara terus menerus dan tidak terputus.³⁰ Keamanan energi mengkolaborasikan dimensi kebijakan luar negeri yang signifikan dalam hal menjaga hubungan baik dengan investor asing; negara-negara juga melakukan proteksi terhadap ancaman pengiriman pasokan energi lintas-batas dengan keputusan mempekerjakan kekuatan militer dalam perlindungan rute pasokan luar negeri.

Benjamin K. Sovacool dalam artikelnya yang berjudul *Reassessing Energy Security and the Trans-ASEAN Natural Gas Pipeline Network in Southeast Asia* menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi penting terkait pengertian keamanan energi. Hal ini sebagaimana yang digambarkan pada tabel 1.7 sebagai berikut.

³⁰ Michael T. Klare. "Energy Security", dalam Paul D. Williams, *Security Studies Interaction*. (Rotledge, 2008) hlm. 484.

Gambar 1.3. Empat Kriteria Keamanan Energi³¹

Criteria	Underlying Values	Explanation
<i>Availability</i>	Independence and diversification	Diversifying the fuels used to provide energy services as well as the location of facilities using those fuels, promoting energy systems that can recover quickly from attack or disruption, and minimizing dependence on foreign suppliers
<i>Affordability</i>	Equity	Providing energy services that are affordable for consumers and minimizing price volatility
<i>Energy efficiency</i>	Innovation and education	Improving the performance of energy equipment and altering consumer behaviours
<i>Stewardship</i>	Social and environmental sustainability	Protecting the natural environment, communities and future generations

Ketersediaan (*Availability*) berkaitan dengan kemandirian dan diversifikasi bahan bakar energi dan jasa. Penyedia diversifikasi bahan bakar ditujukan untuk mengembangkan beberapa inti produksi energi agar tidak hanya satu perusahaan saja yang menguasai pasar energi.³² Dalam proyek TAGP, jaringan pipa gas alam menjadi elemen penting bagi perekonomian sebagai penyalur pasokan energi secara keseluruhan dalam kawasan dan mengurangi ketergantungan energi dari pemasok asing.³³ Keterjangkauan (*Affordability*) merupakan hal mendasar dalam pelayanan energi, bahwa dibutuhkan harga bahan bakar energi yang terjangkau dan stabil agar perekonomian regional tetap terjaga. Efisiensi Energi (*Energy Efficiency*),

³¹ Benjamin K. Sovacool, *Reassessing Energy Security*, hlm. 4.

³² David G. Victor and Thomas C. Heller, "The Political Economy of Power Sector Reform: The Experiences of Five Major Developing Countries", (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) hlm. 1-30.

³³ Amy Jaffe and Ronald Soligo, "The Role of Inventories in Oil Market Stability," dalam *Quarterly Review of Economics and Finance* 42, 2002. hlm. 401-415.

menjelaskan adanya peningkatan pengelolaan sumber daya bahan bakar dan peningkatan penyebaran infrastruktur energi yang lebih efisien, dan perubahan pola perilaku konsumen. Pengelolaan Lingkungan (*environmental stewardship*) menekankan pentingnya pembangunan keberlanjutan. *Stewardship* berarti memastikan bahwa sistem energi diterima secara sosial; bahwa tingkat panen sumber daya terbarukan tidak melebihi tingkat regenerasi; memastikan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak melebihi kapasitas asimilatif relevan ekosistem; dan menjamin bahwa sumber daya non-terbarukan hanya habis pada tingkat yang sama dengan penciptaan yang terbarukan.³⁴

1.5.4 *Neo-Liberal Institutionalism*

Steven S. Lamy mengemukakan teori institusionalisme neoliberal sebagai suatu studi yang menjelaskan pengembangan perspektif neoliberal. Lamy menjelaskan bahwa cara untuk meraih kemakmuran dan perdamaian adalah bagaimana negara-negara merdeka mengumpulkan sumber daya yang dimiliki atau bahkan mengurangi beberapa kedaulatan negara untuk menciptakan komunitas yang terintegrasi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan merespons persoalan-persoalan regional.³⁵

Sedangkan Keohane dan Nye menjelaskan bahwa dunia saat ini lebih saling tergantung satu sama lain. Dijelaskan bahwa interdependensi yang sangat kompleks

³⁴ Benjamin K. Sovacool, "Reassessing Energy Security and the Trans-ASEAN Natural Gas Pipeline Network in Southeast Asia", (Energy Policy, 2015) hlm. 469-481.

³⁵ Steven L. Lamy, "Contemporary Mainstream Approaches: Neorealism and Neoliberalism". Dalam John Baylis & Steve Smith (Eds.) "The Globalization of World Politics: An Introduction to Internasional Relations", Third Edition, (New York: Oxford University Press, 2001) hlm. 213.

ini memiliki empat karakteristik, yakni (1) peningkatan hubungan antara negara dan non-negara; (2) agenda internasional tidak lagi dibedakan secara tajam antara *high* dan *low politics*; (3) pengakuan atas berbagai saluran untuk interaksi di antara negara melintasi batas-batas nasional; dan (4) menurunnya kekuasaan militer sebagai alat keahlian seorang pemimpin negara.³⁶

Para pemikir neoinstitusionalisme mengidentifikasi adanya empat asumsi pokok.³⁷ *Pertama*, negara merupakan aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi bukanlah satu-satunya aktor signifikan. Negara selalu berusaha untuk memaksimalkan kepentingan nasional pada hampir semua isu. *Kedua*, dalam lingkungan yang kompetitif, negara berusaha memaksimalkan keuntungan melalui kerja sama. *Ketiga*, kendala terbesar kerja sama yang berhasil adalah ketidakrelaan atau kecurangan yang dilakukan suatu negara. *Keempat*, kerja sama tidak akan pernah tanpa masalah, tetapi negara menggeser sumber daya dan kedaulatannya jika negara melihat keuntungan bersama, dan jika kerja sama tersebut menyediakan suatu peningkatan kesempatan untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing negara.³⁸

1.5.5 Cooperative Energy Governance (CEG)

Garick B. Pursley menjelaskan bahwa para teoritis dan pembuat kebijakan di era hubungan internasional kontemporer mengakui bahwa reformasi regulasi

³⁶ Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, "Power and Interdependence: World Politics in Transition". (Boston: Little, Brown and Company (Inc.), 1997). Dalam *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Prof. Drs. Budi Winarno, M.A., PhD., (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2014) hlm. 99.

³⁷ Lamy, *Contemporary Mainstream Approaches*, hlm. 213.

³⁸ *Ibid.*, 213-214

energi merupakan bagian penting dari sistem energi masa depan yang berkelanjutan dan aman di seluruh dunia.³⁹ Pembenahan sistem energi untuk mengakomodasi sumber energi terbarukan, serta ekstraksi produksi, transmisi dan teknik pengiriman baru memerlukan inovasi teknologi yang cepat,⁴⁰ dan hal ini dapat dikelola melalui pengembangan struktur pemerintahan baru untuk mendorong penyebaran, integrasi dan fungsi efisien dari teknologi terbarukan pada infrastruktur energi melalui inovasi peraturan yang terus berpacu mengikuti perubahan teknologi.⁴¹ Dalam hal ini Pursley menyatakan bahwa untuk mengatasi hal-hal yang telah disebutkan maka dibentuk rezim peraturan kerjasama di bidang energi yang merangkul pemerintahan lokal dan federal, yang mana pemerintahan lokal dapat menentukan peran dalam mengarahkan perubahan peraturan yang diatur dalam kerjasama yang seringkali bermuatan kepentingan-kepentingan berdasarkan perhitungan politik dan ekonomi.⁴²

Hubungan antara energi dan lingkungan kemudian membentuk kerangka analisa bahwa adanya alokasi kebijakan lingkungan dapat digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana untuk merestrukturisasi regulasi energi. Dalam hal ini kerjasama dalam pembuatan regulasi mengenai lingkungan dan energi dilakukan dengan cara perjanjian konsensus baik antar negara pada tataran internasional atau regional, maupun sub-nasional pada pemerintahan lokal secara terpusat. Adanya

³⁹ Garick B. Pursley, "Unblocking Cooperative Energy Governance", https://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/workingpapers/documents/Pursley_Unblocking.pdf

⁴⁰ Pursley & Wiseman, *supra* note 1, at 901–04 (discussing the need for technological innovation).

⁴¹ Timothy A. Slating & Jay P. Kesan, "Making Regulatory Innovation Keep Pace with Technological Innovation", 2011, WIS. L. REV. 1109, 1117–18

⁴² Garick B. Pursley, *Unblocking Cooperative Energy Governance*, hlm. 1-2.

regulasi energi dan lingkungan tersebut memberikan solusi pada masalah-masalah nasional yang secara publik dan terjadi di dunia sehingga membutuhkan tindakan penanganan oleh tingkat yang lebih tinggi dari pemerintahan nasional. Hal ini kemudian membentuk tanggapan terkoordinasi untuk menangani masalah-masalah yang terjadi pada *interstate*.⁴³

Thijs Van de Graaf dalam artikelnya yang berjudul *Fragmentation in Global Energy Governance: Explaining the Creation of IRENA* menjelaskan bahwa terdapat fenomena ketika negara menciptakan lembaga-lembaga dengan otoritas diatas pemerintahan nasional yang dimanfaatkan untuk memajukan fragmentasi kepentingan secara keseluruhan. Adapun pembentukan dari lembaga-lembaga bentukan para negara atau kelompok kepentingan dapat memacu penciptaan organisasi internasional tandingan jika ada koalisi yang cukup kuat dari negara-negara yang tidak puas di mana lembaga yang menjabat telah kehilangan dukungan dari dalam negeri. Penciptaan lembaga pengimbang yang kredibel kemudian dapat menciptakan tekanan pada pihak luar untuk bergabung dalam lembaga baru untuk mempengaruhi proses perundingan, untuk memenuhi konstituen domestik, dan untuk menuai imbalan reputasi.⁴⁴

Tim Forsyth menjelaskan gagasan mengenai *Cooperative Environmental Governance* (CEG) pada dasarnya merupakan perumusan pembuat kebijakan bidang energi yang didalamnya terdapat partisipasi aktif baik negara, kelompok kepentingan, aktor transnasional, dan masyarakat untuk membentuk suatu

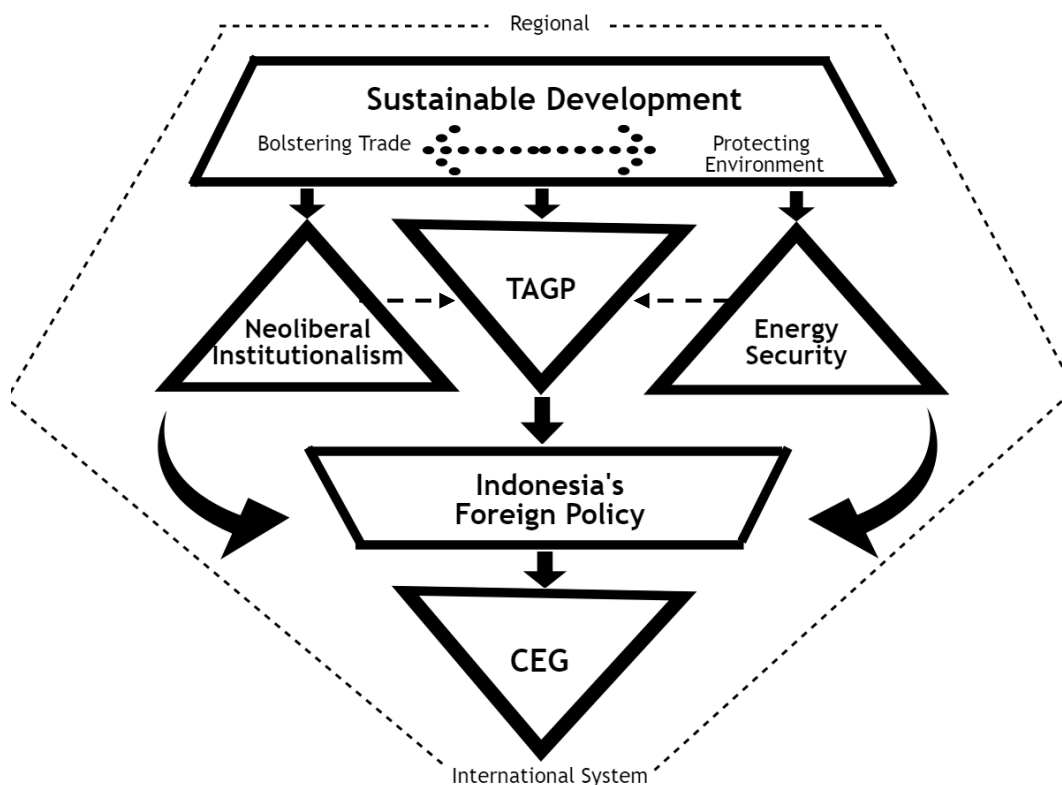
⁴³ *Ibid.*, hlm. 5-10.

⁴⁴ Thijs Van de Graaf, "Fragmentation in Global Energy Governance: Explaining the Creation of IRENA", <https://biblio.ugent.be/publication/3259978/file/6791059.pdf>

kerjasama lintas sektor. Kemudian tujuan utama dari tata kelola CEG yaitu untuk mengatasi sifat konflikual melalui negosiasi dan untuk mencari celah negosiasi positif yang sebagian besar digunakan untuk mengejar kepentingan-kepentingan politik negara maupun kerjasama dengan investor di bidang pembangunan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

1.5.6 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.4. Sintesa Pemikiran *Diamond Linkage*



⁴⁵ Tim Forsyth, "Cooperative environmental governance and waste-to-energy technologies in Asia", (LSE Research Online, 2006), [http://eprints.lse.ac.uk/4718/1/Cooperative_environmental_governance_and_waste_to_energy_technologies_in_Asia_\(LSERO\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/4718/1/Cooperative_environmental_governance_and_waste_to_energy_technologies_in_Asia_(LSERO).pdf)

Skema *Diamond Linkage* di atas menjelaskan secara singkat mulai dari alur Latar Belakang sampai dengan Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini. Garis panah hitam tebal menjelaskan interaksi langsung (*direct*) dan adanya hubungan sebab akibat, sedangkan garis panah putus-putus menjelaskan suatu kemungkinan akibat atau implikasi dari teori yang digunakan, dan garis putus-putus menjelaskan interaksi tidak langsung (*indirect*) serta relativitas tinggi.

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development* menjadi kerangka penting dalam menjelaskan dasar dari upaya ASEAN untuk memajukan pertumbuhan ekonomi kawasan dengan mengutamakan aspek-aspek perlindungan lingkungan. ASEAN kemudian mendorong dibentuknya koordinasi keamanan energi dengan merangkul energi terbarukan dan efisiensi energi, dan mendukung pengelolaan gas alam sebagai ganti dari penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, sesuai dengan perspektif neoliberal institusional, ASEAN mengupayakan cara untuk meraih kemakmuran dengan mendorong masing-masing negara anggota secara bersama-sama mengelola sumber daya yang dimiliki untuk melakukan kerjasama terintegrasi dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan merespons persoalan-persoalan regional. Proyek TAGP memenuhi gagasan keamanan energi karena secara bersamaan mampu mengelola distribusi dan akses sumber daya energi terbarukan, sekaligus menjadi instrumen kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam hal aturan perdagangan *supply* energi terbarukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Dalam melihat peluang semakin majunya pertumbuhan ekonomi kawasan melalui proyek TAGP dan cita-cita mengintegrasikan kawasan ASEAN kemudian mempengaruhi arah kebijakan luar

negeri Republik Indonesia melalui kerjasama baik secara regional maupun internasional berdasarkan kerangka *Cooperative Energy Governance*.

1.6 Hipotesis

Penggunaan energi terbarukan gas alam digunakan sebagai rujukan alternatif dari pembangunan berkelanjutan, yakni untuk menyeimbangkan antara perlindungan keberlanjutan lingkungan dan memperkuat perdagangan. Upaya pengamanan energi ASEAN diimplementasikan dalam pembentukan proyek *Trans ASEAN Gas Pipelines* (TAGP). Perkembangan dari proyek TAGP kemudian membawa pengaruh terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya peningkatan kerjasama energi melalui rezim internasional yang dimanifestasikan dalam kerangka *Cooperative Energy Governance* (CEG) berdasarkan prioritas lingkaran konsentris utama kebijakan luar negeri Indonesia yang meliputi kerjasama intra-regional melalui *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation* (APAEC), inter-regional melalui *ASEAN+3 Energy Security Forum* (ESF), dan internasional melalui *International Energy Agency* (IEA) dari tahun 2002 sampai tahun 2015.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Secara konseptual Hudson menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri, yang berasal dari kata *Foreign Policy* dalam bahasa Inggris, merupakan suatu konsep yang menjadi ciri khas dari hubungan internasional.⁴⁶ James Rosenau dalam Dubis mengatakan bahwa *foreign policy* adalah tindakan negara ataupun keinginan negara untuk melakukan tindakan demi menjaga atau menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam lingkup internasional.⁴⁷ Dugis menyimpulkan bahwa Kebijakan luar negeri akhirnya dapat diartikan sebagai tindakan ataupun pertimbangan yang diambil pemerintahan suatu negara dengan tujuan-tujuan tertentu dalam hubungannya dengan pemerintahan negara lain ataupun dengan entitas lain diluar batas teritorialnya.⁴⁸ Deborah Gerner dalam Neack menganggap bahwa *foreign policy* adalah keinginan, pernyataan, dan tindakan dari aktor-aktor internasional yang ditujukan pada aktor lainnya.⁴⁹

Georg Sorensen dan Jackson Robert menyatakan bahwa analisis kebijakan luar negeri adalah studi manajemen hubungan eksternal dan aktivitas-aktivitas negara-bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijakan dalam negerinya. Kebijakan luar negeri merupakan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan,

⁴⁶ V. Hudson, "Culture and Foreign Policy: Developing a Research Agenda". Dalam *Culture and Foreign Policy*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1997) hlm. 1-24. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. (Plymouth : Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2007)

⁴⁷ Dugis, V. "Analysing Foreign Policy. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, 20(2)", Dalam tesis Radityo Dharmaputra, *Pengaruh Nilai-Nilai Eurasianisme Terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia (2000-2009)*, (Universitas Airlangga, 2007) hlm. 13.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Lousie Neack, "The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era. 2nd ed", (Plymouth: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2008) hlm. 9.

pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan interaksi hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non-pemerintah dengan tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan dengan negara-negara asing.⁵⁰

Sedangkan Bernard C. Cohen menekankan bahwa kebijakan luar negeri lebih penting dari kebijakan-kebijakan lainnya karena menyangkut kepentingan nasional, bukan kepentingan khusus, dan mempunyai nilai-nilai yang lebih fundamental.⁵¹ Menurut Cohen analisis kebijakan luar negeri memiliki fokus pada dua implikasi utama. Yang pertama fokus pada bagaimana lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri bisa dibuat lebih efisien dalam menjalankan tugas mereka. Yang kedua lebih bersifat ideologis, pada dasarnya melibatkan seruan akan demokratisasi kebijakan luar negeri, yakni tentang bagaimana nilai-nilai dan kepentingan masyarakat harus dimasukkan pada setiap tahapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut menambahkan bahwa dalam analisis kebijakan luar negeri terdapat faktor-faktor kognitif dan psikologis, politik birokrasi dan neoinstitutional, pelaku krisis, implementasi kebijakan, proses-proses pengambilan keputusan kelompok, dan hubungan transnasional.⁵²

⁵⁰ George Sorensen & Robert Jackson, "Konsep Kebijakan Luar Negeri" dalam *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 439.

⁵¹Walter Carlsnaes, "Kebijakan Luar Negeri", dalam *Handbook Hubungan Internasional*, Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, (Bandung: Nusa Media, 2013) hlm. 681-683.

⁵² *Ibid*

Secara operasional kebijakan luar negeri dalam penelitian ini merujuk pada tindakan negara Indonesia dalam menjaga keamanan energi di kawasan ASEAN. Dalam hal ini pemerintah Indonesia memahami bahwa adanya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran energi yang didorong pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya industrialisasi dunia mengakibatkan terkurasnya cadangan energi dalam jumlah besar, khususnya energi fosil yang merupakan sumber energi utama dunia. Pemulihan ekonomi global yang dimotori pertumbuhan ekonomi tinggi di Asia yang diiringi peningkatan permintaan energi untuk industri dan konsumsi, turut mendorong kenaikan harga energi dunia.⁵³ Berdasarkan pemahaman tersebut kemudian Indonesia berupaya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, ikut terdampak kondisi energi, baik di tingkat global maupun secara nasional.

1.7.1.2 Kerjasama Internasional

Secara konseptual menurut Dougherty dan Pfalzgraff, kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan,

⁵³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Kebijakan Isu-Isu Khusus: Krisis Energi”, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Krisis-Energi.aspx>

dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.⁵⁴

Menurut Kalevi Jaakko Holisti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:⁵⁵

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa ketika terdapat hubungan interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa

⁵⁴James Dougherty dan Robert Pfaltzgraff, Jr., "Contending Theories of International Relations", (New York: Longman, 1997) hlm. 418-419.

⁵⁵ K.J. Holisti, "Politik internasional, Kerangka Untuk Analisis", Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. (Jakarta: Airlangga, 1998), hlm. 652-653.

organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.⁵⁶

Adapun tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan ini, Sjamsumar Dam dan Riswandi dalam Zulkifli menjelaskan bahwa diperlukannya suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.⁵⁷

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama. *Pertama*, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. *Kedua*, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan.⁵⁸

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Republik Indonesia tahun 2008, Dian Triansyah Djani Kerjasama menjelaskan bahwa internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan

⁵⁶Robert Jackson dan Georg Sorensen, "Pengantar Studi Hubungan Internasional". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 63-64.

⁵⁷ Sjamsumar Dam dan Riswandi, "Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm 15. Dikutip dari tesis Zulkifli, *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Indonesia*, (Universitas Indonesia, 2012) hlm. 34.

⁵⁸ *Ibid*

peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasionalnya.⁵⁹ Sehingga secara operasional Indonesia melakukan kerjasama internasional khususnya pada bidang keamanan energi dengan bergabung dalam organisasi internasional.

1.7.1.3 Kerjasama Regional

Secara konseptual menurut K.J. Holsti dan Hans J. Morgenthau, Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.⁶⁰ Joseph Nye menjelaskan bahwa semakin beragamnya aktor non-negara menimbulkan keadaan dimana kebutuhan untuk keamanan politik dan semakin menghargai arti penting dari perdamaian serta kerjasama dan interdependensi.⁶¹ Hal ini kemudian menjadi ciri khusus dari regionalisme karena ketika interaksi antar negara sudah semakin intensif maka akan melahirkan kecenderungan saling ketergantungan. John Howard membandingkan geografi berdasarkan letak fisik dan ekonomi, bahwa kerjasama pada lingkup geografis tertentu akan membuat pertumbuhan kawasan lebih cepat di dunia.⁶²

Secara operasional kerjasama regional kemudian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni kerjasama *Inter-regional* dan *Intra-regional*. *Pertama*, kerjasama inter-regional merujuk pada hubungan atau interaksi kerjasama antara satu *region* dengan *region* lainnya. *Kedua*, kerjasama intra-regional merujuk pada

⁵⁹Dian Triansyah Djani, "ASEAN Selayang Pandang". (Jakarta, 2008)
www.kemlu.go.id/Documents/ASEAN%20Selayang%20Pandang.doc

⁶⁰ Craig A Synder, "Contemporary Security and Strategy", (Palgrave: Macmillan, 2008), hlm. 228.

⁶¹ Joseph Nye, Jr (ed.), "Internasional Regionalism", (Boston:Little Brown & Co, 1968), hlm. 12.

⁶² Peter J. Katzenstein, "Regionalism and Asia". (Warwick Studies, 2000)

hubungan atau interaksi kerjasama antara negara-negara dalam suatu *region* atau kawasan. Berdasarkan pemahaman tersebut penelitian ini merujuk pada tujuan utama negara-negara melakukan kerjasama baik secara inter-regional maupun intra-regional yakni untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dan menyelesaikan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

1.7.1.4 Lingkaran Konsentris Politik Luar Negeri Indonesia

Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lingkaran konsentris didefinisikan sebagai dua atau lebih lingkaran yang memiliki pusat yang sama.⁶³ Lingkaran konsentris dalam konteks pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Ali Alatas yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang merujuk pada instrumen yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah internasional, serta menempatkan posisi Indonesia dalam menghadapi permasalahan internasional.⁶⁴

Menurut A. Zakaria Zulfikar dalam pengaplikasian pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menganut asas lingkaran konsentris, dengan tujuan untuk dapat meraih dan mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui hubungan diplomatik serta aktivitasnya dalam dunia internasional dengan negara-negara lain ataupun organisasi-organisasi internasional antar negara⁶⁵ Terminologi lingkaran konsentris ini digunakan sebagai istilah untuk membantu mempermudah dalam hal

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Lingkaran Konsentris", <http://kbbi.web.id/konsentris>

⁶⁴ Zulfikar, A. Zakaria, "Politik Luar Negeri Indonesia", (Jakarta, 2009), http://issuu.com/munshi/docs/politik_luar_negeri_ri

⁶⁵ *Ibid*

menganalisa masalah-masalah dan juga isu-isu internasional yang ada, dan juga untuk dapat menempatkan serta menentukan posisi yang tepat didalam menghadapi dan mengatasi masalah internasional yang ada secara nyata.

Berdasarkan pemaparan Zakaria, terdapat setidaknya tiga dimensi yang digunakan dalam lingkaran konsentris. Yang pertama merupakan dimensi regional yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia. Yang kedua merupakan dimensi organisasional yang merujuk pada posisi Indonesia dalam tatanan internasional. Yang ketiga merupakan dimensi fungsional yang merupakan peran Indonesia dalam tatanan internasional.⁶⁶ Dalam konteks intermestik, kinerja diplomasi Indonesia menunjukkan penguatan, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Kebijakan luar negeri Indonesia harus dapat mencerminkan transformasi demokratis di dalam negeri.⁶⁷

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengaplikasikan konsep lingkaran konsentris guna mengklasifikasikan fokus prioritas politik luar negeri Indonesia. Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional, Kementerian Luar Negeri menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (*concentric circles*) yang terdiri dari:⁶⁸

- Lingkaran pertama adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Landasan, Visi dan Misi Poldagri: Ringkasan", <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/landasan-visi-misi-poldagri/Pages/Ringkasan.aspx>

⁶⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kebijakan Kerjasama Regional", <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/default.aspx>

- Kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea Selatan). Di luar hal tersebut, Indonesia juga mengadakan hubungan kerja sama yang intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia.
- Dalam lingkaran konsentris yang ketiga, Indonesia mengakui pentingnya menggalang kerja sama dengan *like-minded developing countries*.

Dengan forum-forum tersebut Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Sementara itu, pada level global, Indonesia mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan multilateralisme melalui organisasi internasional seperti PBB, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdamaian dan keamanan dunia.⁶⁹

Sehingga secara operasional, kebijakan luar negeri Indonesia di bidang kerjasama energi dilaksanakan berdasarkan tiga prioritas lingkaran konsentris utama. Yang diantaranya ialah lingkaran pertama secara regional melalui ASEAN, lingkaran kedua secara antar regional melalui ASEAN+3, dan lingkaran ketiga secara internasional melalui organisasi internasional IEA. Sehingga melalui klasifikasi prioritas forum-forum tersebut, Indonesia dapat mengupayakan kepentingan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan integrasi kawasan ASEAN di bidang kerjasama energi baik secara regional maupun internasional.

⁶⁹ *Ibid*

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian eksplanatif dimana tipe ini memberikan gambaran serta menyajikan fakta yang ada dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Peneliti berupaya untuk menjelaskan bagaimana kerjasama energi ASEAN dalam proyek TAGP dapat berpengaruh pada arah kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2002 sampai tahun 2015 dikaji dari analisa *Cooperative Energy Governance*. Yanuar Ikbar menjelaskan bahwa didasarkan pada acuan literatur penelitian eksplanatif, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penggambaran (*to description*) dan peramalan suatu masalah (*to prediction*) terdapat pola penjelasan (*to explanation*) yang ditawarkan dan tidak hanya satu jenis melainkan kombinasi dari dua atau lebih penjelasan.⁷⁰ Adapun menurut Jack S. Levy dan John Stuart Mill, penelitian eksplanatif memiliki logika dasar untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang memiliki nilai berbeda atas variabel independen dan nilai-nilai serupa pada variabel dependen.⁷¹

Melalui tipe penelitian eksplanatif peneliti berusaha menjelaskan hubungan antara kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2002 sampai tahun 2015 sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kerjasama energi ASEAN dalam proyek *Trans ASEAN Gas Pipelines* (TAGP) sebagai variabel independen menggunakan kajian *Cooperative Energy Governance*.

⁷⁰ Yanuar Ikbar, "Metodologi dan Teori Hubungan Internasional", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014) hlm. 9.

⁷¹ Jack S. Levy, "Metode Kualitatif dalam Hubungan Internasional", dalam Alexander Wendt, Richard Little, et.al., *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Pragmatik dan Pendekatan Alternatif*. (Malang: Intrans Publishing, 2014) hlm. 117.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kerjasama energi ASEAN dalam proyek TAGP terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karenanya, pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi mulai tahun 2002 sampai tahun 2015. Pemilihan era ini didasarkan pada pandangan bahwa tahun 2002 merupakan awal terbentuknya kerjasama energi ASEAN dalam proyek TAGP hingga perkembangan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang tergabung dalam beberapa kerjasama internasional berdasarkan prioritas lingkaran konsentrasinya, khususnya pada pengesahan *ASEAN Plan Action for Energy Cooperation* (APAEC) pada tahun 2015. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penggunaan beberapa data di luar jangkauan penelitian yang mampu mendukung, memperkuat, serta memperdalam analisis yang dilakukan.

Penelitian ini juga membatasi hubungan korelasional aktor internasional yang terlibat. Penelitian ini hanya membahas negara Indonesia, negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Korea, dan Cina beserta lembaga representasi kepentingan masing-masing, yaitu ASEAN, ASEAN+3, IEA. Dimana implikasi hubungan kerjasama energi Indonesia didasarkan pada prioritas lingkaran konsentris kebijakan luar negeri, yakni intra-regional, inter-regional, dan internasional.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana penjelasan Silalahi, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi literatur atau kepustakaan.⁷² Data menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian sebelumnya. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan ini adalah data primer yakni dokumen resmi *ASEAN Blueprint*, *ASEAN Selayang Pandang*, Transkrip keanggotaan ASEAN dalam organisasi internasional yang diperoleh dari situs resmi maupun diperoleh dari hasil kegiatan seminar oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yakni data-data tertulis yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan situs internet. Bungin menjelaskan bahwa pengumpulan data melalui buku, jurnal dan artikel disebut juga teknik pengumpulan data dokumenter. Sedangkan sumber data dari internet diperbolehkan asal masih tergaransi pertanggung jawaban empirisnya.⁷³

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisa data kualitatif karena berupa kasus-kasus, artikel yang dimuat dalam media, maupun pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak yang terkait. Denzin dan Lincoln menjelaskan proses berlangsungnya analisa penelitian kualitatif, yang terdiri dari tiga alur kegiatan.⁷⁴ Tahap pertama yakni asumsi dasar atau kerangka teoritikal yang digunakan untuk menjelaskan pokok masalah dalam penelitian sosial. Tahap

⁷² Uber Silalahi, "Metode Penelitian Sosial", (Bandung: Unpar Press, 2006) hlm. 28.

⁷³ Bungin dalam Silalahi, *ibid.*, hlm 28.

⁷⁴ Denzin & Lincoln, "Handbook of Qualitative Research", (Sage Publisher, 2011) hlm.3. Dalam Anonymous, *Qualitative Study*, http://www.sagepub.com/upm-data/46924_CH_3.pdf

kedua yakni untuk menganalisa permasalahan yang diangkat pada suatu penelitian digunakan metode pengumpulan data. Hal ini digunakan untuk mereduksi, menggolongkan, megarahkan, hingga digunakan untuk menyajikan bukti analisa permasalahan sebagai bahan pembahasan penelitian. Tahap Ketiga yakni penarikan kesimpulan digunakan sebagai laporan akhir dari permasalahan yang dianalisa oleh peneliti, dengan menggunakan penjabaran kompleks dan interpretasi peneliti dari masalah yang di angkat, dan kemudian digunakan sebagai kontribusi peneliti untuk penelitian literatur kedepannya. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi asumsi dasar penelitian berdasarkan kerangka teoritikal, pengumpulan data, melakukan pembahasan, dan menyajikan kesimpulan.

Sedangkan Silalahi menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar ang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Reduksi data dapat secara konkret diwujudkan dengan kegiatan seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Tahap kedua yaitu penyajian data, yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif. Saat ini penyajian data dapat meliputi matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada akhirnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.⁷⁵

⁷⁵ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 28.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam lima bab utama. Lima bab tersebut tersusun secara berurutan sebagai berikut:

1. BAB I merupakan metodologi penulisan yang tersusun atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.
2. BAB II berisi kumpulan data pendukung penelitian dan penjelasan lengkap berdasarkan kerangka pemikiran penelitian. Data pendukung yang digunakan meliputi (1) data sejarah awal interaksi antar negara anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dan pembentukan proyek TAGP; dan (2) data keamanan energi dan pengelolaan sumber daya energi terbarukan pada proyek TAGP (3) data strategi keamanan energi proyek TAGP yang mengarah pada peningkatan interaksi global.
3. BAB III berisi analisis hasil pengumpulan data penelitian beserta penjelasan lengkap kerangka pemikiran penelitian. Dalam BAB III ini analisa yang dibangun berdasarkan pemaparan data meliputi (1) data kerjasama perdagangan *supply* energi kawasan dan data pertumbuhan ekonomi ASEAN melalui perkembangan proyek TAGP; (2) analisa terkait bagaimana kerjasama energi dalam proyek TAGP memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya peningkatan

kerjasama energi berdasarkan kerangka analisis *Cooperative Energy Governance* sesuai dengan prioritas utama lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia, yakni intra-regional melalui *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation* (APAEC), inter-regional melalui *ASEAN+3 Energy Security Forum* (ESF), dan internasional melalui *International Energy Agency* (IEA) dari tahun 2002 sampai tahun 2015.

4. BAB IV adalah kesimpulan penelitian. Kesimpulan berisi sintesis pemikiran mulai dari BAB I, metodologi penelitian, sampai dengan BAB III, analisis data dan kerangka pemikiran penelitian.